

**Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal di Yogyakarta  
( Study Kasus Pengembangan Desa Wisata Kebonagung  
Kabupaten Bantul)**

**Sunan Al Adiyat . H<sup>1</sup>, Nunik Retno H, S.Sos<sup>2</sup>, Drs. Priyatno Harsasto, MA<sup>3</sup>**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The process of local economic development contained in Bantul implemented based participatory approach that emphasizes on the analysis of sectoral , spatial , and marketing and focus on three ( 3 ) main areas , namely tourism, agriculture and small industries . Post-earthquake economic recovery program integrated LED stated in the Strategic Plan 2008-2010 Bantul . But actually before the year 2008 there has been some economic recovery programs undertaken by the government , both central and local levels that are one- offs . Referring to the Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning , Government Regulation No. 26 Year 2008 on National Spatial Plan , and Local Regulations Yogyakarta Special Region No. 2 of 2010 on Spatial Planning Special Province of Yogyakarta , the concept and utilization of national spatial strategy and the province need to be translated into Spatial Planning Bantul designated as Zone designation artificial tourism in the District are in : Tourism Village KebunKebun Supreme Court in the Village , as well as No. 03 of 2004 on Regional Tourism Development Master Plan Bantul , also Bantul Regency Decree No.359 was developed as a tourist village in 2006 and refers to the PEL Sector Policy with Community Based Tourism Tourism is developing community -based tourism have proven themselves resilient consolidate after the earthquake ( Travel villages ) , as well as develop a network between a tourist village that lays on Rural Tourism Development Policy of local Economic development perspective , emphasizing the development of rural tourism is an alternative to the economic development of the people by making tourism as the prime mover ( prime mover ) local economy .

---

<sup>1</sup> Sunan Al Adiyat . H adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang. Alamat email : [Ninjers46@gmail.com](mailto:Ninjers46@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

With reference to the above legislation it is expected that development of rural tourism Kebonagung collapsed due to lack of government's handling of the village and also worse off as a result of an earthquake , it can be developed into a village that can potentially evolve so beneficial to the welfare of society .

This study aims to : 1) determine the local economic development programs in post- quake economic recovery in Bantul district from 2007 through 2012 , and 2 ) determine the condition of village development Kebonagung after the rise and growing as a tourist village agriculture and culture . While the research method used is descriptive qualitative interview guide using the speakers.

The results showed that the efforts of the Local Economic Development in Post-Earthquake Recovery Economic Conditions in Bantul during this three (3) major steps , namely : a) careful planning based on accurate data and a single database , which is the basis of all program developed b ) Conduct efforts so that poor families reduced the burden of his life , through various assistance that aims to relieve , reduce , freeing expenses ( costs ) to be incurred families ,and ; 3 ) Perform empowerment efforts . The data in question , not just about the amount , but also with regard to the condition and position of the poor families . This data is projected to show the profile of the poor , including the problems faced . Kebonagung village developments show the rise and increasingly manifest as the development of the agricultural and cultural tourism village . It can be seen from the indicators : a) Quality b) Quantity c) Cost -effectiveness d) Need for Supervision , and e ) Impact nterpersonal.

*Keywords : Evaluation of Local Economic Development Program, Recovery Economic Conditions, Kabupaten Bantul*

## **A. Pendahuluan**

Gempa bumi tektonik yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 7 tahun silam, tepat 27 Mei 2006 telah meluluhlantakan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kabupaten Bantul salah satu daerah yang terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau wilayah paling dekat dengan *episentrum* luluh lantak hanya dalam hitungan 57 detik. Dengan banyaknya rumah yang rusak berdampak pada hilangnya potensi pendapatan masyarakat.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) masalah dasar yang harus dihadapi rakyat dan pemerintah pasca bencana gempa, yakni: *Pertama*, menurunnya kualitas kehidupan rakyat. *Kedua*, menurunnya kualitas layanan pelayanan umum sebagai akibat kerusakan sejumlah sarana dan prasarana. *Ketiga*, terganggunya perekonomian rakyat atau bahkan dapat dikatakan bahwa perekonomian rakyat sempat lumpuh beberapa saat setelah gempa bumi terjadi.

Strategi yang didukung baik dari internal maupun eksternal, yang dapat dibuktikan dengan diadakannya forum Pengembangan Ekonomi Lokal (Forum PEL) yang dilakukan oleh UNDP dan dikeluarkannya SK Bupati Nomor 125 Tahun 2008 mengenai Pemulihan Perekonomian Bantul dengan pengembangan ekonomi lokal. Proses pengembangan ekonomi lokal yang terdapat di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan pendekatan *participatory* dan menekankan pada analisis sektoral, spasial, dan pemasaran yang memfokuskan pada 3 (tiga) bidang utama yaitu pariwisata, pertanian serta industri kecil. Program pemulihan ekonomi pasca gempa yang terintegrasi baru tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bantul Tahun 2008-2010. Akibat gempa yang melanda Kabupaten Bantul tersebut Kabupaten Bantul seharusnya cepat berbenah diri, pemerintah dan masyarakat bergotongroyong bersama-sama membuat strategi membangun kembali perekonomian mereka yang hancur akibat gempa.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis bermaksud melakukan evaluasi dengan mengajukan topik penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam

Program Pengembangan Ekonomi Lokal Pemulihan Kondisi Perekonomian Pasca Gempa di Yogyakarta (Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Kebonagung Kabupaten Bantul)

Sehingga perumusan masalah yang dapat menjadi bahan penelitian adalah :

1. Bagaimana program pengembangan ekonomi lokal dalam pemulihan kondisi perekonomian pasca gempa di Kabupaten Bantul dari tahun 2007 hingga tahun 2013 ?
2. Bagaimana perkembangan Desa Kebonagung setelah bangkit dan berkembang sebagai desa wisata pertanian dan budaya ?

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jumlah penduduk miskin dan pengangguran telah mengalami peningkatan pasca bencana, di mana kini tercatat sebanyak 74.362 KK miskin (35 persen), dan pengangguran terbuka sebanyak 8,95 persen. Kondisi ini tentu saja akan mengubah semua rencana awal yang telah disusun sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Tantangan baru yang dihadapi pada kenyataan keterbatasan kemampuan pemerintah, sebagai akibat peningkatan beban pembangunan, tentu saja menuntut suatu strategi pembangunan yang lebih kontekstual, berwawasan pengurangan resiko bencana dan berorientasi melakukan percepatan perbaikan kualitas kehidupan rakyat, serta menurunkan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Salah satu contoh kebijakan Pemerintah Bantul dengan dibentuknya program PEL yang dimana terbentuk pasca terjadinya bencana Gempa Bumi.

Tahun 2006 silam. Dari sini, pemerintah dan masyarakat bergotongroyong membangun kembali perekonomian masyarakat. Strategi ini didukung baik dari internal maupun eksternal, yang dapat dibuktikan dengan diadakannya Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (Forum PEL) yang dilakukan oleh UNDP dan dikeluarkannya Dasar hukum SK Bupati Bantul No. 125 Tahun 2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Bantul 2008 mengenai Pemulihan Perekonomian Bantul dengan pengembangan ekonomi lokal. Keanggotaannya Berasal dari Perwakilan Unsur Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat Sipil (Kel. Masyarakat, LSM, dan Perguruan Tinggi) dengan komposisi yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut. Proses pengembangan ekonomi lokal yang terdapat di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan pendekatan *participatory* dan menekankan pada analisis sektoral, spasial, dan pemasaran yang memfokuskan pada tiga bidang utama yaitu **pariwisata, pertanian serta industri kecil**. Kebangkitan perekonomian lokal di Kabupaten Bantul tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Bantul 2008-2010, selanjutnya disebut Renstra PEL Bantul, merupakan dokumen perencanaan dalam pengembangan ekonomi lokal Bantul yang memuat visi, misi, strategi kebijakan dan program-program prioritas selama kurun waktu tiga tahun (2008-2010) yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, dengan memasukkan pertimbangan pengurangan risiko bencana dan kesetaraan gender.

Pengertian secara umum pengembangan Ekonomi lokal adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pemeran (stakeholders) ekonomi yakni

pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi daerah (Bappenas, 2003). Pengembangan ekonomi lokal menawarkan pemerintah lokal, sektor swasta, sektor non-profit dan komunitas lokal sebuah kesempatan untuk bekerjasama meningkatkan ekonomi lokal. Fokusnya adalah pada peningkatan daya saing lokal, yang dapat meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga pertumbuhan lokal yang inklusif. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal mengarah pada tiga sektor utama yang bisa menjadi pengungkit perekonomian Bantul, yakni pertanian, industri pengolahan (termasuk kerajinan) dan pariwisata. Untuk pengembangan ketiga sektortersebut, kebijakan utama yang di tempuh adalah : (1) *Craftmanship Industrial Area*; (2) *Agro-Based Industry* (3) *Community Based Tourism*..

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di: Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, serta Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul, Juga Surat Keputusan Bupati Bantul No. 359 dikembangkan sebagai desa wisata

pada tahun 2006 dan mengacu pada Kebijakan PEL Sektor Pariwisata dengan *Community Based Tourism* yaitu mengembangkan pariwisata berbasis komunitas karena terbukti tangguh mengkonsolidasikan diri pasca gempa (desa Wisata), serta mengembangkan jaringan antar desa wisata yang memaparkan tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pedesaan dari Perspektif Pengembangan Ekonomi Lokal, menekankan pengembangan desa wisata merupakan alternatif pengembangan ekonomi rakyat dengan menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi lokal.

Dengan mengacu pada undang–undang di atas maka diharapkan pengembangan desa wisata Kebonagung yang terpuruk akibat kurangnya penanganan pemerintah terhadap desa tersebut dan juga semakin terpuruk akibat adanya gempa bumi, maka dapat dikembangkan menjadi desa potensial. Salah satu wujud penerapan strategi program sebagai momentum kebangkitan perekonomian lokal di Kabupaten Bantul dapat dilihat di Desa Wisata yang dikembangkan di Desa Kebonagung, yang hingga sekarang sudah mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di sektor; pariwisata, pertanian dan budaya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terbukti bahwa eksistensi desa Kebonagung sebagai desa wisata yang berbasis pengembangan ekonomi lokal berhasil meningkatkan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti berpotensi positif bagi peningkatan PAD Kabupaten Bantul, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2

## Perkembangan Tenaga Kerja dan Industri di Desa Kebonagung

Tahun	Unit Usaha	TenagaKerja	Perkembangan (%)
2009	76	300	-
2010	80	330	0,01
2011	85	445	0,03
2012	130	1020	0,13
2013	136	1877	0,08

Sumber: Laporan Pokok-Pokok Data Kabupaten Bantul, 2014.

Pandangan Bupati secara normatif sangat mungkin untuk diimplementasikan, apabila kebijakan yang ditelurkan pemerintah alam rangka mengembangkan ekonomi lokal tersebut didukung sepenuhnya oleh masyarakat sebagai subyek sekaligus sasaran dari program pengembangan ekonomi lokal yang hendak dikembangkan. Kasus di desa Kebon Agung, Kepala Desa Kebon Agung sangat mendukung langkah Bupati, karena:<sup>4</sup>

Karena pada awalnya masyarakat Desa Kebon Agung merasa bahwa desa mereka memiliki keindahan alam yang dapat dieksploitasi, terutama keindahan alam perairan berupa Bendungan Tegal dan Sungai Opak yang memiliki daya tarik dan pesona alam, serta potensi seni budaya seperti seni tradisi karawitan, laras wadya, wayangkulit, tarian nagguk, jatilan, dll, potensi kuliner seperti wedang uwuh, gudeg manggar, jadah tempe, potensi kerajinan rumah tangga seperti gerabah, anyaman bamboo dll yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Maka masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi sebuah ciri khas pariwisata yang diunggulkan dengan menjadikannya Desa Wisata Kebon Agung.

Kepala Desa Kebon Agung juga menambahkan bahwa:<sup>5</sup>

sampai saat ini program tersebut sudah berjalan dengan baik, nyata dilihat dari sudut pandang pariwisata daerah Bantul saja sudah mulai menunjukkan eksistensinya dari dua puluh enam desawisata yang ada di Bantul. Salah

<sup>4</sup> Wawancara dengan Eka Supriyadi, ST Kepala Desa Kebonagung, 26 Pebruari 2014, jam 11.20 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*



satunya desa wisata yang kami miliki sangat positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kami tentunya.

Kondisi positif sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Kebon Agung di atas, patut mendapatkan apresiasi, karena dengan modal semangat dan spirit membangun dan menutup adanya kemungkinan menengok ke masa lalu yang suram (pasca gempa), Kebon Agung telah berkembang menjadi suatu kawasan desa wisata yang unit, dengan berbagai potensi dan kekayaan budaya, seni, potensi alam, potensi sosial dan agrobisnisnya, sehingga secara evolutif kawasan ini menjadi kawasan yang maju, yang salah satunya dapat diukur melalui semakin tingginya jumlah wisatawan yang menginap di desa Kebon Agung, baik untuk menikmati suasana pedesaan dengan pesona alamnya yang indah, melakukan aktivitas arung jeram di sungai Opak, menikmati kuliner, menikmati seni karawitan dan seni tradisional lainnya, atau sekedar menikmati suasana liburan bersama keluarga. Dengan kualitas jalan yang sudah ditingkatkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka akseptabilitas menuju desa Kebon Agung ke depan akan semakin mudah dijangkau dari segala arah, dan kondisi seperti itu akan semakin meningkatkan minat dan motif wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk melancong ke Desa Kebon Agung

Tabel 3.4  
Bentuk Kegiatan Pariwisata dan Tarif

No	Macam Kegiatan	Harga Paket Wisata
1	Pertanian	Rp 30.000
2	Membatik Kain	Rp 40.000
3	Cetak Gerabah	Rp 35.000

4	Batik Kayu	Rp 40.000
5	Menghias Capping	Rp 40.000
6	Belajar Karawitan	Rp 30.000
7	Ngenger	Rp 25.000
8	Naik Perahu menyusuri Sungai Opak	Rp 30.000
9	Rias Janur	Rp 35.000
10	Bersepeda Santai	Rp 30.000
11	Hiking Mencari Jejak	Rp 15.000
12	Api Unggun Sambil Membakar Jagung Manis	Rp 25.000
13	Memancing Ikan (Alat Pancing, Umpan Tersedia)	Rp 20.000
14	Proses Membuat Telor Asin	Rp 10.000
15	Proses Membuat Gula Jawa	Rp 15.000
16	Proses Membuat Kue Apem	Rp 15.000
17	Proses Membuat Kue Cemplon	Rp 10.000
18	Senam Kesehatan Jasmani	Rp 10.000
19	Perlombaan Gejog Lesung	Rp 20.000
20	Outbond (flying fox dan permainan tradisional)	Rp 40.000
21	Belajar seni tari Jatilan	Rp 25.000
22	Homestay/orang (termasuk makan 3x/1 orang)	Rp 100.000

Sumber: Data Penawaran Paket Wisata Desa Kebonagung 2013

#### D. Kesimpulan

Program-program hasil dari Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal adalah:

1. Dukungan dalam pengembangan iklim usaha daerah

Upaya penyederhanaan proses perijinan untuk pelaku ekonomi lokal yang dimulai dari tahap masuk ke dunia usaha, selama melaksanakan kegiatan usaha sampai setelah keluar dari dunia usaha.

## 2. Dukungan dalam peningkatan kapasitas ekonomi lokal

Pengembangan kapasitas daerah seperti prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan kapasitas para pelaku kegiatan ekonomi.

## 3. Dukungan dalam proses pengembangan ekonomi lokal

Fasilitasi kepada pelaku kegiatan ekonomi lokal dan daerah, baik dari sisi masyarakat, swasta, maupun sisi pemerintah daerah

Dilihat dari perekonomian Kabupaten Bantul Setelah adanya kebijakan Pemerintah tersebut Kabupaten Bantul dinilai sudah menunjukkan perubahan yang signifikan terutama dilihat dari perekonomian masyarakatnya yang dimana pada awal gempa bumi di kabupaten Bantul pada tahun 2006 sangat terpuruk lambat laun tidak lagi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya, tetapi menjadi lebih bangkit dengan adanya gempa tersebut tidak lain berhasilnya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bantul sangat bergantung pada partisipasi seluruh stakeholder ( Pemerintah dan seluruh lapisan Masyarakat Bantul pada khususnya) yang ada, sehingga hasil pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan. Salah satu upaya program Pengembangan ekonomi Lokal dalam upaya pembangunan perekonomian Kabupaten Bantul adalah terkait dalam pengembangan sektor pariwisata di antaranya yaitu: Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas karena terbukti tangguh mengkonsolidasikan diri pasca

gempa (desa Wisata), serta mengembangkan jaringan antar Desa Wisata. Salah satu wujud dari program pengembangan Desa Wisata tersebut adalah Pengembangan Desa Wisata Kebonagung yang dimana Desa Wisata Desa Kebonagung merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa ini terkenal sebagai Desa Wisata Pendidikan Pertanian yang bernuansa kultur dan Budaya.

Desa ini memiliki daya tarik sendiri bagi para wisatawannya, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Meskipun dikenal dengan wisata tani, Desa Kebonagung juga menawarkan beragam wisata menarik lainnya antara lain wisata pendidikan pertanian, wisata budaya serta budaya lokal tradisional.

Kelemahan dalam pengembangan kawasan Desa Wisata Kebonagung yang berkelanjutan adalah

- Kurangnya pelatihan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, karena jenis pariwisata ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya. Unsur penting lainnya adalah memperbaiki manajemen lokal yang mengelola Desa Wisata Kebon Agung. Dengan dibentuknya komunitas POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) maka diharapkan dapat lebih konsisten dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kebonagung yang lebih baik sehingga dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakatnya.

- Kelemahan lain yang muncul adalah limited carrying capacity atau terbatasnya kapasitas daya tampung. Homestay yang tersedia adalah sebanyak rumah hunian yang layak yang terdapat di Desa Wisata Kebon Agung. Sampai saat ini homestay resmi yang ditunjuk oleh pengelola adalah sebanyak 60 homestay dengan jumlah kamar sebanyak 151 kamar dengan kapasitas mencapai 344 orang. Hal ini memang merupakan salah satu ciri wisata minat khusus. Adanya keterbatasan pada kapasitas tertentu untuk tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Terkait masalah kapasitas daya tampung, yang menjadi poin munculnya kelemahan adalah tersedianya sarana pendukung wisata yang dianggap masih kurang.
- Kurangnya ketersediaan lahan praktek pertanian yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pengelola. Usaha pengajuan beberapa alternatif cara penyelesaian belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah Desa setempat. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas wisata yang tercipta, mengingat bahwa wisata andalan Desa Wisata Kebon Agung adalah wisata pertanian. Saat ini lahan yang tersedia luasnya kurang dari 1ha dan hanya mampu menampung sekitar 40orang. Keadaan menjadi lebih mengkhawatirkan karenapada saat ini perbedaan masa tanam sangat pendek , sehingga pengelola tidak memiliki banyak pilihan untuk menyewa lahan tambahan.

## **E. Saran**

Dan untuk proses pengembangan Desa Wisata Kebonagung yang berkelanjutan perlu adanya sosialisasi dan partisipasi oleh pemerintah dengan cara :

1. Perlu adanya pelatihan yang lebih mendalam terkait kemampuan manajemen desa wisata terkait dengan SDM yang ada.
2. Perlu adanya pendampingan dan pengawasan kepada Desa Wisata Kebon Agung sebagai sarana pengembangan lebih lanjut dan sebagai partner dalam menggali pengetahuan komunitas tentang kepariwisataan.
3. Pengadaan pelatihan-pelatihan terkait program kepariwisataan yang lebih berkesinambungan.
4. Perlunya pengadaan dana untuk melengkapi pengadaan sarana dan pasarana yang menunjang dan memadai guna kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Kebonagung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Bacaan**

- Arikunto, Suharsimi. 2000, Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Blair, John P, Local Economic Development Analysis and Practice, Sage Publication Inc. California 1995.
- Dunn William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Glasson, John, Pengantar Perencanaan Regional, Edisi Terjemahan Paul Sihotang, LPFE UI, Jakarta, 1977.
- Imron*, Ali, 1996. Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Irawan dan M. Suparmoko, 1992. *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA
- Kadariah, Ekonomi Perencanaan, LPFE UI Jakarta, 1985.
- Ma'rif, Samsul, Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis, Diktat Kuliah PWK UNDIP Semarang, 2002.

Miles and Hubberman, 1984. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yogyakarta: Kanisius

Moleong, J. Lexy, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Rosda: Bandung.

Morgenthau, 1982. *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional*. New York

Nasution. (2001). *Total Quality Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawanir, Hanif (2003), Studi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Kota Sawahlunto Pascatambang, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2003)

Parr, John B, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*, Carfax Publishing 1999.

R. Wrihatnolo Randy dan Nugroho Riant, 2006. *Sebuah Pengantar dan Panduan: Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Radhi Fahmy, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, Republika, 2008, Jakarta. Hlm. 87

Suharto Edi, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama.

Sukirno Sadono, 2007 *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar kebijakan*, Jakarta : Kencana

#### **Artikel**

Prioritas Pembangunan DI Yogyakarta 2007, Nota kesepakatan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dengan DPRD DI Yogyakarta.

Kedaulatan Rakyat, 17 September 2006

#### **Internet:**

[purbasari.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com...task.akarta&source=Ewdeisbi:&1c0d/=O1&ktvoebde=r02C0E09gQFjAA&url=http%3A%2F%](http://purbasari.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com...task.akarta&source=Ewdeisbi:&1c0d/=O1&ktvoebde=r02C0E09gQFjAA&url=http%3A%2F%2F)

<http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-evaluasi-kebijakan.html>

[www.kapanlagi.com/h/0000223572\\_print.html](http://www.kapanlagi.com/h/0000223572_print.html). akses 01 september 2008

#### **Produk Hukum:**

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta.

UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah RI 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2012

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR\\_S/HAND\\_OUT\\_MAKUL\\_KONSEP\\_RESORT\\_AND\\_LEISURE/PENGEMBANGAN\\_KAWASAN\\_DESA\\_WISATA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MAKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf)

Strategi yang didukung baik dari internal maupun eksternal, yang dapat dibuktikan dengan diadakannya forum Pengembangan Ekonomi Lokal (Forum PEL) yang dilakukan oleh UNDP dan dikeluarkannya SK Bupati Nomor 125 Tahun 2008 mengenai Pemulihan Perekonomian Bantul dengan pengembangan ekonomi lokal.



Proses pengembangan ekonomi lokal yang terdapat di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan pendekatan *participatory* dan menekankan pada analisis sektoral, spasial, dan pemasaran yang memfokuskan pada 3 (tiga) bidang utama yaitu pariwisata, pertanian serta industri kecil. Program pemulihan ekonomi pascagempa yang terintegrasi baru tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bantul Tahun 2008-2010. Namun demikian, sebelum tahun 2008 telah ada beberapa program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Departemen Dalam Negeri, maupun daerah yang bersifat *one-offs* (kecil, tidak terintegrasi dengan program lain, dan diberikan hanya sekali). Bantuan yang dimaksud antara lain bantuan mesin peralatan, bantuan pemasaran produk melalui pameran, bantuan dana bergulir dan kendaraan untuk koperasi, pelatihan ekspor dan manajemen, selain pembangunan kios dan pasar.

Kurangnya perhatian untuk memaksimalkan komunitas masyarakat bawah akan berdampak pada semakin banyaknya keluarga miskin di daerah pedesaan. Mereka yang sebagian besar adalah keluarga tani dan buruh tani hampir tidak tersentuh oleh kebijakan pembangunan dari pusat. Artinya, kebijakan yang ada tidak sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Jika sampaipun, hanya akan menguntungkan elite di daerah pedesaan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lapisan bawah tidaklah cukup untuk menjangkau dan mengakses berbagai kebijakan yang ditawarkan

oleh Pemerintah. Akibatnya, perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bawah terjadi tanpa kebijakan elite. Masyarakat bawah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Sehingga diperlukannya suatu kebijakan oleh Pemerintah yang pro-rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, kata kunci kebijakan terletak pada keberpihakan karena tidak mungkin mengajak mereka berkompetisi dalam lapangan ekonomi. Melalui pembinaan intensif masyarakat secara bertahap akan menjadi mandiri, berpendapatan meningkat, dan terbebas dari kemiskinan.

Dengan mengacu adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di: Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, serta Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul, Juga Surat Keputusan Bupati Bantul No. 359 dikembangkan sebagai desa wisata pada tahun 2006 dan mengacu pada Kebijakan PEL Sektor Pariwisata dengan *Community Based Tourism* yaitu mengembangkan pariwisata berbasis komunitas karena terbukti tangguh mengkonsolidasikan diri pasca gempa

(desa Wisata), serta mengembangkan jaringan antar desa wisata yang memaparkan tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pedesaan dari Perspektif Pengembangan Ekonomi Lokal, menekankan pengembangan desa wisata merupakan alternatif pengembangan ekonomi rakyat dengan menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi lokal.

Dengan mengacu pada undang–undang di atas maka diharapkan pengembangan desa wisata Kebonagung yang terpuruk akibat kurangnya penanganan pemerintah terhadap desa tersebut dan juga semakin terpuruk akibat adanya gempa bumi, maka dapat dikembangkan menjadi desa potensial yang dapat berkembang sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya.